BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan aktor yang menarik dalam pemerintahan, menarik dalam hal status, fungsi, dan koordinasi partai terhadap aktor-aktor lainnya. Peran partai politik mulai hilang seiring dengan berjalannya waktu, hilang karena media atau bahkan memang hilang karena kelemahan anggota yang kurang menjaga eksistensi partai. Selama ini, partai politik ramai dibicarakan hanya lima tahun sekali, yaitu pada saat pra pemilu saja. Partai-partai mulai bermunculan dengan segudang pemberitaan akan keterlibatan partai dalam masyarakat.

Partai politik memiliki fungsi yang dapat dikatakan berat sebagai sebuah organisasi yang tidak berpenghasilan tetapi justru mengeluarkan dana mandiri. Untuk menjadi seorang pemimpin yang membawa nama rakyat, kader partai seharusnya merupakan orang-orang yang pernah berjuang memperjuangkan rakyat, yang pernah melayani tanpa perlu mendapat imbalan. Beberapa fungsi partai partai politik memiliki kesamaan dengan fungsi anggota dewan, salah satunya menyerap, dan mendengar aspirasi masyarakat, fungsi inilah yang kemudian terlihat dalam beberapa isu-isu yang muncul dikalangan masyarakat yang memiliki aspirasi untuk pemerintahan, seperti contohnya pemekaran wilayah.

Semenjak masa reformasi, pemerintah daerah memiliki hak,

wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kepuasan masyarakat menjadi salah satu tujuan utama pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang Otonomi Daerah menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah yang cenderung terabaikan karena letak yang jauh dari pemerintah pusat.

Kabupaten Cilacap menjadi salah satu daerah otonom yang memiliki beberapa hal untuk dibenahi. Luasnya daerah pemerintahan menimbulkan ketimpangan pelayanan publik di daerah sekitar ibukota kabupaten dengan daerah terluar kabupaten seperti pendapat Parsiyan, anggota dewan dari Kecamatan Sidareja, sebagai berikut.

> Jarak Cilacap barat ke Cilacap itu sekitar 120 kilometer. Belum lagi mereka yang tinggal di pedesaan maka harus menempuh perjalanan lebih jauh lagi dan mahal karena sarana transportasi di pedesaan menuju ke jalan raya belum dilalui angkutan umum" (Radar Banyumas, 9 Januari 2007: 9).

Ratusan kilometer jalan nasional di wilayah Cilacap dalam kondisi rusak. Kondisi ini banyak menuai keluhan warga yang setiap hari memanfaatkan ruas jalan tersebut untuk beraktivitas. Hal ini didukung oleh pendapat Rosidin, warga Kecamatan Gandrungmangu "*dalane bosok kabeh, sing dilewati kabeh bolong, rusak*" (http://satelitnews.co.id/2013/07/05/177-km-jalan-nasional-di-cilacap-rusak/ pada tanggal 1 Oktober 2013 jam

22.34). Ia beranggapan, pemerintah sangat lamban dalam menangani permasalahan yang tersebut. Ketua Serikat Tani Merdeka Cilacap, Petrus Sugeng, mengatakan menurutnya, dengan mata telanjang saja ketimpangan itu sudah terlihat. Paling jelas adalah infrastruktur jalan. Pelayanan, pembangunan, dan perekonomian desa pun terhambat karena rusaknya ruas jalan utama. Dikatakan BPT Bina Marga Cilacap, berdasarkan data, 537 km ruas jalan nasional yang berada di wilayah Cilacap, sepanjang 357 km di antaranya dalam kondisi rusak.

Tidak seimbangnya pembangunan antara Cilacap bagian barat dan timur menimbulkan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Cilacap bagian barat jauh tertinggal dibanding Cilacap bagian timur. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan warga di bagian barat dengan memperkuat isu di kalangan masyarakat untuk memekarkan diri. Aspirasi masyarakat untuk memekarkan diri dirasa cukup beralasan dan merasa perlu dilakukan. Semenjak adanya kebijakan pemekaran wilayah, jumlah daerah pemekaran terus bertambah, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Provinsi, Kabuaten dan Kota Pemekaran di Indonesia Tahun 1950-2006

Periode	**Provinsi**	**Kabupaten/Kota**
1950-1955	6	99
1956-1960	16	145
1961-1965	3	16
1966-1970	1	11
1971-1998	1	33
1999-2006	7	155 (kab. 129, Kota 26)

Sumber : Tri Ratnawati (2009: 13)

Pelaksanaan Pemekaran Wilayah tidak luput dari peran para aktor yang memiliki tugas tersendiri guna menyukseskan pemekaran wilayah tersebut. Aktor-aktor yang berperan dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Aktor-Aktor dalam Proses Pemekaran Kabupaten Cilacap

NO	NAMA INSTANSI
1.	Pemerintah Daerah
2.	Partai Politik
3.	Perguruan Tinggi
4.	Organisasi Masyarakat
5.	Lembaga Swadaya Masyarakat
6.	Tokoh Daerah dan Tokoh Keagamaan

Sumber : Paguyuban Warga Cilacap Barat

Tersedianya aktor-aktor yang menindak lanjuti proses ini tidak dapat menjamin lancarnya proses pemekaran di Kabupaten Cilacap. Contohya, Gubernur Jawa Tengah periode 2008-2013, H. Bibit Waluyo menolak adanya pemekaran di provinsi Jawa Tengah dengan kekhawatiran isu tersebut sengaja dimunculkan oleh mereka yang memiliki kepentingan terhadap pemekaran Cilacap bagian barat yang ingin menjadi anggota dewan atau bupati. Karena tidak jarang daerah yang dimekarkan justru semakin terpuruk karena tidak ada sokongan sumber daya yang kuat guna pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah baru.

Isu politik menjadi salah satu permasalahan yang muncul dalam pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap. Dari keinginan beberapa

kecamatan yang mengunggulkan diri untuk menjadi ibu kota kabupaten baru hingga para pejabat daerah yang akan menduduki kursi pemerintahan baru di Kabupaten Cilacap bagian barat. Pemekaran wilayah akan membentuk sebuah pemerintah baru yang akan memimpin daerah tersebut. Para pemimpin ini lah yang nantinya memiliki andil besar dalam mempertanggungjawabkan daerah hasil pemekaran.

Melihat banyak dibutuhkannya para pemimpin baru untuk calon kabupaten dan isu kepentingan politik yang kuat, dapat dikerucutkan pada sebuah kelompok yang menjadi sasaran fokus kepentingan dalam pemekaran yaitu partai politik. Sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam proses pemekaran wilayah, partai politik memiliki kedudukan tersendiri dalam sebuah sistem politik untuk mempengaruhi pembentukan sebuah kebijakan pemekaran wilayah. Melihat kedudukan partai politik, partai politik memiliki peranan yang cukup penting sebagai salah satu alat pemerintahan dimana partai politik merupakan sebuah wadah pertama untuk dijadikannya para pemimpin bangsa. “Partai politik memiliki fungsi *interest aggregation* dan *interest articulation* dimana mereka bertugas untuk menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat dimasyarakat serta menjadi wadah penggabungan aspirasi masyarakat yang senada agar dapat dirumuskan secara lebih terstruktur atau teratur. Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijaksanaan, untuk diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik” (Miriam Budiardjo, 2008:403).

Banyaknya partai politik dalam negara demokrasi memberikan pilihan bagi rakyat untuk memilih partai mana yang telah menjalankan fungsinya dengan baik untuk mereka percayai menjadi wakil dalam pemerintahan. Dari berbagai pilihan, ada satu partai politik yang menarik perhatian penulis karena keaktifan mereka dalam menjalankan aktivitas politik di daerah maupun dukungan terhadap proses pemekaran wilayah dalam dunia maya. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Cilacap, kekuatan politik partai PDIP pada pemilu legislatif Tahun 2009 dengan perolehan suara lebih dari 50% di beberapa kecamatan di Kabupaten Cilacap bagian barat. Alasan diatas diperkuat dengan jumlah keterwakilan partai PDIP dalam DPRD Cilacap mendapatkan kursi terbanyak, yaitu 14 kursi anggota dewan.

Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah inti pembahasan mengenai partai politik yang berbeda dari pandangan masyarakat secara umum. Ketika masyarakat mendengar kata partai politik, hal yang dipikirkan adalah pemilu, penebar janji, dan kecurangan dalam berpolitik, karena lemahnya partisipasi partai politik dalam masyarakat yang memunculkan sikap apatis terhadap para pemimpin bangsa karena perilaku para pemimpin yang mengecewakan masyarakat. Tanpa disadari bahwa para pemimpin bangsa terpilih adalah mereka-mereka yang pernah menjadi anggota partai politik. Dengan demikian, perilaku pemimpin memiliki hubungan yang cukup kuat akan kinerja pemimpin pada saat masih menduduki partai politik, jika para pemimpin terpilih sudah menjalankan

perannya pada saat mereka masin menjadi anggota partai, pastilah tugas mereka sebagai wakil rakyat di pemerintahan bukan hal yang sulit, karena aktifitas mendengar, menyaring, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sudah pernah mereka lakukan ketika mereka bertahan didalam partai. Pada penelitian ini peneliti ingin memberikan pandangan yang berbeda, seperti penjelasan Miriam Budiardjo (2008:404) bahwa partai politik tidak hanya sekedar aktif dalam pemilu, lebih dari itu partai politik memiliki peran penting dalam melalui proses pelaksanaan pemerintahan. Penelitian ini juga memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat terkait peran partai politik bahkan pengetahuan anggota partai yang masih belum paham mengenai peran mereka dalam pemerintahan. Ketidakpahaman inilah yang seringkali membuat kader-kader partai melakukan penyimpangan saat menduduki jabatan pemerintahan karena mereka belum sadar seberapa besar peran yang harus mereka lakukan.

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam sistem demokrasi dengan adanya aspirasi masyarakat yang perlu ditindak lanjuti pemerintah. Sejauhmana peran PDIP dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap melalui tahapan sistem politik sebagai salah satu partai yang dipercayai menduduki kursi anggota terbanyak di DPRD Cilacap dan keaktifannya dalam aktifitas politik daerah serta dukungan di dunia maya dalam memberikan informasi pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap. Kegiatan apasaja yang dilakukan PDIP dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai partai politik dalam

pemerintahan sampai pada tahap apa PDIP memperjuangkan aspirasi tersebut jika dilihat dalam sistem politik.

Penelitian dilaksanakan dengan melihat kinerja partai pada proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap. Peneliti meneliti dan menyusun sebuah laporan penelitian dengan judul peran partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) dalam memperjuangkan pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan beberapa masalah berikut:

1. Usulan pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap belum disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah periode 2008-2013 karena Cilacap bagian Barat belum cukup kuat untuk berdiri sendiri dan hanya akan memunculkan masalah-masalah baru.
2. Beberapa kecamatan saling mengunggulkan daerah nya untuk dijadikan ibukota kabupaten baru sehingga menimbulkan sedikit kecemburuan antar kecamatan di Cilacap bagian barat.
3. Munculnya isu kepentingan-kepentingan politik.
4. Peran PDIP dalam proses pemekaran wilayah yang kurang jelas sehingga tumbuh sikap apatis masyarakat terhadap dukungan yang diberikan partai politik karena menyiratkan isu-isu kepentingan politik.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas diperoleh beberapa hal yang dapat diteliti. Namun karena keterbatasan waktu dan sumber daya yang peneliti miliki, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi mengenai bagaimana peran partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) dalam memperjuangkan pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran PDIP dalam memperjuangkan proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimanakah PDIP menjalankan perannya dalam tahapan sistem politik?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menjelaskan peran PDIP dalam memperjuangkan proses pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap.
2. Mengetahui dan mendapatkan informasi terkait tahapan peran PDIP dalam sistem politik.

F. Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan yang hendak dicapai, maka suatu penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat, yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan ilmu bagi pembaca

terkait Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dibidang peran partai politik dalam sistem politik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai persayaratan tugas akhir dan kesempatan untuk dapat menerapkan teori-teori dalam perkuliahan khususnya teori di bidang operasional ke dalam dunia nyata dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian dan menambah wawasan peneliti terkait partai politik, masyarakat, dan pemerintah.

b. Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Sebagai salah satu pustaka bagi PDIP mengenai gambaran peran dan fungsi partai politik dalam negara demokrasi, serta catatan sejarah perjuangan PDIP dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai berkas penelitian berupa pengetahuan mengenai hubungan/garis kerja mengenai partai politik, masyarakat, dan pemerintah. Menjadi dokumentasi laporan mengenai proses pemekaran wilayah Cilacap dan pengetahuan baru masyarakat terkait kinerja partai yang pantas dijadikan wakil rakyat dalam pemerintahan.

d. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan Administrasi Negara khususnya dan wawasan mengenai kesatuan birokrasi antara masyarakat, partai politik, dan pemerintah.